

## ANALISIS INTEGRASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGGAJIAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) PADA PT. PUTRA DUMAS LESTARI

Bella Nurhudiani<sup>1)</sup>, Laylan Syafina<sup>2)</sup>, Kusmilawaty<sup>3)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan<sup>1,2,3)</sup>  
e-mail: bellanurhudiani@gmail.com<sup>1)</sup>, laylansyafina@uinsu.ac.id<sup>2)</sup>, kusmilawaty@uinsu.ac.id<sup>3)</sup>

### *Abstrak*

*Pada penelitian ini membahas tentang penerapan sistem informasi akuntansi dalam penggajian dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) pada PT. Putra Dumas Lestari. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa dalam sistem perhitungan penggajian karyawan dilakukan disesuaikan dengan jumlah absensi dan skill karyawan. Hal ini dinilai kurang efektif jika absensi dilakukan secara manual (dengan tanda tangan karyawan) dan scan finger jika terjadi error system. Sedangkan untuk pengenaan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan memiliki dua sistem yang berbeda berdasarkan peraturan dan kebijakan terbaru dari pemerintah.*

**Kata kunci:** Integrasi, Penggajian, PPh 21.

### *Abstract*

*This study discusses the application of an accounting information system to payroll and the imposition of Article 21 Income Tax (PPh Article 21) at PT. Putra Dumas Lestari. The results of the study indicate that the employee payroll calculation system is adjusted based on the number of absences and employee skills. This is considered ineffective if attendance is recorded manually (with employee signatures) and requires fingerprint scanning in case of system errors. Meanwhile, the imposition of Article 21 Income Tax on employee salaries has two different systems based on the latest government regulations and policies.*

**Keywords:** Integration, Payroll, PPh Article 21.

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) telah menjadi hal yang sangat penting untuk system operasional dan pengambilan keputusan di berbagai perusahaan. Tujuan dari SIA adalah untuk mengolah data keuangan dan akuntansi serta menciptakan laporan keuangan yang mana bisa manajer atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam mengambil keputusan sebuah bisnis (Putri & Syafina, 2018). Sistem ini melibatkan informasi seputar pendapatan, pengeluaran, informasi karyawan, serta aspek perpajakan dari sebuah perusahaan (Meisyah et al., 2024; Samanto, 2021).

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atas kerja keras karyawannya, waktu dan pemikiran dengan berupa gaji, bonus, tunjangan yang sesuai dan tepat waktu (Suryanti et al., 2023). Ketelitian dan menghitung gaji yang akan dibayarkan merupakan hal yang sangat penting. Bila sering terjadi kesalahan dalam perhitungan gaji tentu akan menimbulkan masalah antara perusahaan dengan karyawannya. Solusi terbaik yaitu dengan adanya system komputerisasi yang dimana dapat menghasilkan data yang benar, cepat dan akurat, sehingga dapat meringankan pekerjaan perhitungan yang kompleks dengan kesalahan yang relative kecil (Intishar & Muanas, 2018). Sistem informasi penggajian ini juga termasuk didalamnya perhitungan Pajak Penghasilan karyawan (Hanum et al., 2022; Siregar et al., 2023).

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Rizqi et al., 2023). Pajak

diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang bersifat memaksa untuk seluruh warga Negara. Di era modernisasi saat ini, upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak bergantung pada sistem teknologi digital untuk administrasi perpajakan (Setiabudi, 2019). Apalagi pada saat era Covid-19 pada tahun 2019, yang dimana beberapa aktivitas di segala sektor kehidupan menjadi terhambat.

Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan pada saat seperti ini. Sehingga diperlukannya integrasi. Integrasi adalah proses menggabungkan berbagai subsistem menjadi satu sistem yang berfungsi secara bersama-sama (Ferdila & Lailiyah, 2022). Dalam konteks sistem informasi akuntansi, integrasi berarti menghubungkan berbagai modul seperti penggajian, perpajakan, dan absensi ke dalam satu sistem terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi (Langi et al., 2019). Tujuannya ialah agar perusahaan dapat bertahan dalam situasi apapun dan dapat menghindari kerugian yang sangat besar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Manajer Lapangan PT. Putra Dumas Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi seperti absensi masih menggunakan sistem manual untuk di bagian lapangan yang dinilai masih kurang efektif karena masih menggunakan tanda tangan pekerja dan pencatatan manual jika adanya kerja lembur. Hal lain juga ditandai dengan adanya sistem pengawasan pada saat absensi secara manual masih kurang, keterlambatan penyerahan surat kerja lembur pekerja ke bagian staff HRD atau staff personalia, sehingga menyebabkan proses perhitungan penggajian sering terlambat dan kurang efektif. Hal itu akan berdampak pada pengenaan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan lapangan. Sehingga PT. Putra Dumas Lestari membutuhkan suatu sistem informasi penggajian sekaligus perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang cepat dan akurat serta dapat mengoptimalkan agar proses kerja personalia dan keuangan menjadi lebih efektif dan efisiensi.

Pengenaan PPh Pasal 21 kini sudah memiliki sistem informasi akuntansi yang terbaru. Berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya, pada awal tahun 2024 telah dirancang suatu sistem perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan sistem TER (Tarif Efektif Rata-Rata) yang dimana pengenaan PPh pasal 21 dapat dihitung setiap bulannya. Berbeda dengan di tahun sebelumnya bahwa perhitungan dan pengenaan PPh Pasal 21 dihitung per tahun. Maka jika ada penambahan gaji atau tunjangan tidak akan terlihat setiap bulannya dikarenakan perhitungan dilakukan pada satu tahun berjalan.

Sistem absensi dan penggajian manual yang saat ini digunakan oleh PT. Putra Dumas Lestari memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Proses manual cenderung rentan terhadap kesalahan manusia, seperti kesalahan dalam pencatatan waktu kehadiran karyawan dan penghitungan jumlah gaji yang seharusnya dibayarkan. Selain itu, proses manual ini sering menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian penggajian setiap bulan, yang pada akhirnya dapat menurunkan moral dan kepuasan karyawan. Keterlambatan dan ketidakakuratan dalam perhitungan gaji juga berdampak pada pelaporan dan pembayaran pajak yang tidak tepat waktu, yang dapat mengakibatkan sanksi dan denda dari pihak otoritas pajak.

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi telah berkembang pesat dan menawarkan berbagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses bisnis (bahardiansyah et al., 2022; Dwijantara et al., 2021; Sari et al., 2021). PT. Putra Dumas Lestari perlu mengadopsi sistem informasi akuntansi yang canggih untuk menggantikan sistem manual yang sudah usang. Implementasi sistem informasi akuntansi yang terintegrasi akan membantu perusahaan dalam mengelola data absensi, penggajian, dan perpajakan dengan lebih efektif (Yusuf, 2024). Sistem ini tidak hanya akan mengurangi

kesalahan manusia tetapi juga mempercepat proses penggajian, sehingga karyawan menerima gaji tepat waktu. Selain itu, sistem informasi akuntansi yang baik akan memudahkan dalam pelaporan pajak yang akurat, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Regulasi pajak di Indonesia, khususnya yang terkait dengan PPh Pasal 21, terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk perhitungan pajak penghasilan karyawan (Friska & Kamilah, 2022). Penerapan TER memerlukan penyesuaian dalam sistem penggajian dan perpajakan perusahaan agar dapat menghitung pajak dengan benar dan memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. PT. Putra Dumas Lestari harus memastikan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan mampu mengakomodasi perubahan regulasi ini dan memfasilitasi perhitungan pajak yang sesuai dengan TER. Tanpa penyesuaian ini, perusahaan berisiko tidak mematuhi regulasi pajak yang dapat mengakibatkan sanksi dan denda (Murniwati & Ismail, 2024).

Dengan mengidentifikasi dan memahami permasalahan-permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang efektif di PT. Putra Dumas Lestari, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan terhadap regulasi pajak yang berlaku. Dalam keberhasilan sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya yang telah dimilikinya, seperti mengenai sumber daya manusia (RAHMADANI, 2018). perencanaan, keuangan, dan teknologi. Dengan tingkat keahlian yang tinggi dan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan seperti system informasi akuntansi, seseorang akan mampu menjalankan operasional perusahaan sesuai rencana yang telah dibangun dengan tujuan yang sama (Saputri & Siregar, 2019).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yanti & Mustoffa, 2022), berjudul menyimpulkan bahwa system informasi akuntansi penggajian pada PT Daria Dharma Pratama Air Berau sudah berjalan cukup baik, hanya ada beberapa yang tidak sesuai dengan teori yang ada seperti tidak adanya surat perubahan dan pernyataan gaji serta adanya perangkapan tugas. Kendala pada system informasi akuntansi penggajian PT Daria Dharma Pratama Air Berau yaitu surat perintah kerja lembur yang dibuat karyawan belum sampai ke HRD, pencatat waktu hadir mengalami gangguan/error sehingga pekerjaan jadi terkendala serta system pada penggajian masih menggunakan Microsoft excel atau word yang belum menggunakan aplikasi khusus.

Berdasarkan penelitian oleh (Triasari et al., 2022) menyimpulkan bahwa system informasi penggajian dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh ) khusus pasal 21 saat ini pada PT. Infra Indonesia masih dilakukan secara manual dan banyak ditemukan salah perhitungan karena Human Error. Hal ini merugikan karyawan dan juga perusahaan. Penelitian oleh (Suprihati & Kristiyanti, 2021) menyimpulkan bahwa system informasi penggajian PT Indah Yatama Air Cargo Jateng belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mulyadi dan system informasi akuntansi penggajian dalam upaya pengendalian internal PT Indah Yatama Air Cargo Jateng belum sepenuhnya mendukung unsur pengendalian internal terkait dengan penggajian karena ada beberapa fungsi yang belum terpisah.

Penelitian (Astari & Marlina, 2022) meneliti analisis sistem informasi akuntansi penggajian pada PT. Galang Insan Pratama. Penelitian ini menemukan bahwa sistem manual menyebabkan ketidakakuratan dalam penggajian dan menyarankan implementasi sistem informasi berbasis komputer. (Iqbal et al., 2024) fokus pada optimalisasi sistem informasi penggajian dan perhitungan PPh pada PT. Gramaselindo Utama. Mereka

menunjukkan bahwa sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi operasional. Penelitian (Suprihati & Kristiyanti, 2021) menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi penggajian untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal di PT. Sriwijaya 87.

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi meningkatkan keandalan dan efisiensi proses penggajian. Penelitian ini memperbarui dan memperluas temuan dari penelitian sebelumnya dengan beberapa cara: Implementasi Sistem TER (Tarif Efektif Rata-rata). Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah tarif pajak rata-rata yang diterapkan pada penghasilan kena pajak seseorang setelah memperhitungkan berbagai elemen penghasilan dan pengurangan yang berlaku (Aalin, 2018). Penelitian ini fokus pada penerapan TER dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebuah aspek yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Dengan memfokuskan pada TER, penelitian ini menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan perubahan regulasi terbaru. Integrasi Modul Penggajian, Absensi, dan Perpajakan: Penelitian ini mengembangkan dan menguji sistem informasi yang mengintegrasikan ketiga modul ini, memastikan data yang konsisten dan akurat dari absensi hingga pelaporan pajak. Ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada salah satu aspek saja.

Pendekatan Proses Bisnis yang Komprehensif: Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi sistem informasi akuntansi dari segi teknis tetapi juga mempertimbangkan alur kerja bisnis dan proses pengambilan keputusan di PT. Putra Dumas Lestari. Penelitian ini menggunakan data terbaru dari PT. Putra Dumas Lestari, termasuk data absensi, penggajian, dan perpajakan dari tahun 2022-2023. Data ini memberikan wawasan yang lebih akurat mengenai kondisi terkini dan kebutuhan spesifik perusahaan. Kemudian, melakukan analisis mendalam mengenai dampak implementasi sistem informasi akuntansi terhadap efisiensi operasional dan kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas sistem dalam berbagai skenario bisnis dan perubahan regulasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam literatur sistem informasi akuntansi dan perpajakan dengan menawarkan solusi praktis dan terukur untuk mengatasi keterbatasan sistem manual, meningkatkan efektivitas operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak yang berlaku.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi menurut Kasmir adalah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan pengoperasian bisnis (Astari & Marlina, 2022; Iqbal et al., 2024; Sanjaya et al., 2024). Dengan ada sistem akuntansi yang mencukupi, menyebabkan akuntan perusahaan bisa mempersiapkan informasi keuangan untuk tiap tingkatan manajemen, para pemilik, kreditur dan para pemakai laporan keuangan (stakeholder) lain disebabkan atas pengambilan keputusan ekonomi (Erlangga & Sabine, 2023).

### **Penggajian Karyawan**

Menurut (Setiawan & Aisyiah, 2019) gaji umumnya yaitu pembayaran atas penyerahan jasa yang dilaksanakan oleh karyawan yang memiliki jenjang jabatan manajaer, melainkana unutm upah umumnya adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilasanakan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayar dengan tetap per bulan, sedangkan upah dibayar terkait hari kerja, jam kerja atu jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Menurut (Aura & Kamilah, 2024), Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Ini berarti jabatan dan upah berbanding lurus. Masih berkaitan dengan

upah, Pasal 92 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatakan bahwa pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Adapun peninjauan upah tersebut menurut penjelasan pasal ini dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan (bahardiansyah et al., 2022; Erlangga & Sabine, 2023; Mulia et al., 2022).

#### **Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)**

Menurut (Khomsiyah, 2022; Setiabudi, 2019; Zuhendra & Amalia, 2022), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

#### **Regulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Terbaru**

Pada awal tahun 2024 telah terjadi regulasi PPh Pasal 21. Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh pasal 21 yang terutang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2023 tentang tarif Pemotongan PPh pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Skema tarif pemotongan PPh pasal 21 terbagi menjadi dua bagian yakni: tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang dimana perhitungan PPh pasal 21 setahun di masa pajak terakhir, dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pemotongan PPh pasal 21 ini untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 di masa pajak selain Masa Pajak Terakhir atau secara bulanan dan harian. Dasar hukum perhitungan PPh pasal 21 terbaru ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP).

Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah tarif pajak rata-rata yang diterapkan pada penghasilan kena pajak seseorang setelah memperhitungkan berbagai elemen penghasilan dan pengurangan yang berlaku (Aalin, 2018). TER dirancang untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak dan memberikan kepastian bagi wajib pajak mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

- 1) Hitung Penghasilan Bruto: Jumlahkan seluruh penghasilan karyawan sebelum pajak, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lain-lain.
- 2) Kurangi Pengurangan yang Diperbolehkan: Kurangkan penghasilan bruto dengan pengurangan yang diperbolehkan seperti iuran pensiun, asuransi kesehatan, dan pengurangan lain yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): Setelah mendapatkan penghasilan bersih (penghasilan bruto dikurangi pengurangan), hitung penghasilan kena pajak.
- 4) Terapkan TER: Gunakan tarif efektif rata-rata yang berlaku untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan PKP.

Jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan PKP. Perbedaan Utama antara Metode TER dan Metode Perhitungan Sebelumnya (Pohan, 2019):

- 1) **Simplicity:** Metode TER lebih sederhana dibandingkan dengan metode perhitungan progresif sebelumnya yang memerlukan penerapan tarif pajak berbeda pada berbagai lapisan penghasilan. TER mengkonsolidasikan tarif menjadi satu tarif rata-rata yang diterapkan pada seluruh penghasilan kena pajak.
- 2) **Kepastian Pajak:** TER memberikan kepastian kepada wajib pajak mengenai jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan metode progresif, jumlah pajak yang harus dibayar bisa bervariasi tergantung pada tingkat penghasilan dan tarif pajak yang berlaku untuk setiap lapisan penghasilan.
- 3) **Efisiensi Administratif:** Penerapan TER mengurangi beban administratif bagi perusahaan dan otoritas pajak karena perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan mudah diimplementasikan dalam sistem informasi akuntansi.
- 4) **Penyesuaian dengan Perubahan Regulasi:** TER mempermudah penyesuaian dengan perubahan regulasi pajak karena tarif efektif rata-rata bisa disesuaikan lebih mudah dibandingkan dengan mengubah beberapa tarif pada berbagai lapisan penghasilan.

Dengan penerapan TER, diharapkan perusahaan dapat menghitung dan membayar pajak penghasilan karyawan dengan lebih tepat waktu dan akurat, mengurangi risiko kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak yang berlaku.

Menurut (Harun, 2022; Kriswanta et al., 2021; Sari et al., 2021), secara umum yang dimaksud dengan karyawan adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga dan digaji dengan uang. Atau karyawan dapat diartikan juga sebagai orang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan atau lembaga untuk melakukan operasional tempat kerjanya dengan balas jasa berupa uang. Karyawan atau wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan nilai penghasilan yang terbebas dari pajak atau biasa disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, gaji minimum tidak kena pajak sebesar Rp. 4.500.000 per bulan atau kurang dari jumlah itu tidak diwajibkan membayar pajak

### **3. METODE PENELITIAN**

Berisi bagaimana data dikumpulkan, sumber data dan cara analisis data Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian mendeskripsikan permasalahan atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah saat penelitian dilaksanakan data penelitian kemudian di olah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya (Yuliani & Siliwangi, 2018). Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan melengkapi tentang data penggajian pada PT. Putra Dumas Lestari. Metode Observasi merupakan suatu metode penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti terhadap data-data kepegawaian serta menganalisa sistem yang dibutuhkan untuk mengetahui unsur-unsur dari sistem tersebut.

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia (Bandjer et al., 2021). Observasi juga dipahami sebagai “andalan perusahaan etnografi”, maksudnya adalah observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Metode Wawancara

merupakan suatu metode untuk mendapatkan data dengan tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh Narasumber yang berada di lingkungan perusahaan PT.Putra Dumas Lestari.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik yang dipilih untuk diterapkan pada kelompok eksperimen, yang dalam hal ini adalah personalia dan pihak yang berwenang di Perusahaan. Karena dengan adanya metode wawancara, apa yang menjadi permasalahan, kendala dan kondisi yang sebenarnya dapat diketahui dan disimpulkan, sehingga informasi yang ingin didapat lebih lengkap dan efektif.

Metode dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai perhitungan penggajian dan pengenaan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan mulai dari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2024. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti akan menganalisis dokumen tersebut

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis tentang Sistem Informasi Akuntansi di PT Putra Dumas Lestari. Wawancara dilakukan dengan manajer, supervisor, karyawan, dan staf administrasi.

##### **1. Penggunaan SIA dalam Penggajian dan PPh 21**

- a) Implementasi dan Integrasi: Perusahaan telah menggunakan SIA untuk mengelola penggajian sejak tahun 2010. SIA terintegrasi dengan sistem kehadiran karyawan, memastikan konsistensi dan akurasi data.
- b) Efisiensi dan Akurasi: SIA telah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan penggajian dan perhitungan PPh 21 dibandingkan dengan metode manual.
- c) Fitur dan Mekanisme: SIA dilengkapi dengan fitur perhitungan otomatis yang mengikuti peraturan pajak yang berlaku. Sistem ini memfasilitasi pembuatan laporan penggajian dan menyimpan data historis untuk audit dan pelaporan perpajakan.
- d) Kendala dan Solusi: Kendala yang pernah dihadapi meliputi kesulitan integrasi data awal, penyesuaian sistem untuk kebutuhan spesifik perusahaan, dan pemahaman pengguna. Perusahaan telah mengatasi kendala tersebut melalui pelatihan pengguna, pembaruan sistem secara berkala, dan kolaborasi dengan tim IT.

##### **2. Panduan dan Prosedur Standar**

- a) Prosedur Terstruktur: Perusahaan memiliki panduan dan prosedur standar untuk penggunaan SIA dalam penggajian, mencakup langkah-langkah teknis, penginputan data, perhitungan gaji, dan verifikasi.
- b) Langkah-langkah Perhitungan PPh 21: Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perhitungan PPh 21 yang benar meliputi:
  - Pemahaman Aturan PPh 21
  - Konfigurasi Sistem
  - Pengujian Sistem
  - Validasi Data Karyawan
  - Monitoring dan Review Berkala
  - Pembaruan Peraturan Pajak
  - Pelatihan dan Edukasi

##### **3. Audit dan Penanganan Kesalahan**

- a) Frekuensi Audit: Frekuensi audit data penggajian bervariasi, meliputi audit harian, mingguan, bulanan, dan sesuai kebutuhan.

- b) Penanganan Kesalahan: Langkah-langkah penanganan kesalahan meliputi:
    - Identifikasi Masalah
    - Verifikasi Data
    - Konsultasi dengan Tim Terkait
    - Koreksi Data
    - Komunikasi dengan Karyawan
    - Audit Ulang
    - Peningkatan Sistem
    - Laporan dan Dokumentasi
4. Dampak SIA terhadap Efisiensi dan Kepuasan Karyawan
- a) Persepsi Positif: Supervisor, karyawan, dan staf administrasi merasakan manfaat SIA dalam mempermudah tugas mereka, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan akurasi data.
  - b) Kecepatan Pembaruan Data: SIA dapat memperbarui perubahan data karyawan atau peraturan PPh 21 secara real-time atau dalam hitungan menit.
  - c) Kemudahan Penggunaan: SIA dinilai mudah digunakan dengan antarmuka yang user-friendly dan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan.
  - d) Kejelasan Informasi: Informasi mengenai potongan PPh 21 pada slip gaji dinilai cukup jelas, meskipun ada saran untuk meningkatkan penjelasan mengenai dasar perhitungan.
  - e) Respon dan Dukungan: Respon dan dukungan dari departemen HR dan IT dinilai sangat baik, dengan komunikasi yang terbuka dan dukungan teknis yang memadai.

Implementasi SIA di PT Putra Dumas Lestari telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan penggajian dan perhitungan PPh 21. SIA telah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan terhadap peraturan pajak. Perusahaan telah melakukan upaya yang baik dalam mengelola kendala dan memastikan bahwa sistem ini digunakan secara efektif dan efisien.

SLIP GAJI DAN PENGENAAN PPh PASAL 21 JANUARI 2023	
NAMA	WANDYANTO
KODE ABSEN	IL 12
PENDHASILAN	
Gaji Pokok	Rp 3.760.000
Tunjangan	-
PENGURANGAN	
Biaya Jabatan	Rp 189.000
JHT	Rp 75.000
Pensiun	Rp 37.000
POTONGAN	
Pajak Penghasilan (PPh) 21	Rp -
<b>GAJI YANG DITERIMA</b>	<b>Rp 3.477.000</b>

SLIP GAJI DAN PENGENAAN PPh PASAL 21 JANUARI 2023	
NAMA	BUDY HARTANA
KODE ABSEN	PDL03
PENDHASILAN	
Gaji Pokok	Rp 3.830.000
Tunjangan	Rp 1.300.000
PENGURANGAN	
Biaya Jabatan	Rp 395.000
JHT	Rp 116.000
Pensiun	Rp 58.000
POTONGAN	
Pajak Penghasilan (PPh) 21	Rp 58.800
<b>GAJI YANG DITERIMA</b>	<b>Rp 4.704.200</b>

**Gambar 1. Tampilan Slip Gaji dan Perhitungan PPh Pasal 21 Per Bulan**

Pada gambar diatas merupakan slip gaji karyawan yang telah di potong dengan PPh Pasal 21. Pada data ini memuat nama karyawan, kode absen, gaji pokok, tunjangan,

biaya jabatan, Jaminan Hari Tua (JHT), Pensiun, pemotongan PPh Pasal 21, dan terakhir pendapatan gaji karyawan per bulan setelah pajak.

Pada data diatas menunjukkan bahwa atas nama Wandiyanto tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Sedangkan atas nama Rudy Hartama dikenakan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 56.800 setiap bulan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua karyawan tidak dikenakan PPh pasal 21.

KODE KARYAWAN	NAMA KARYAWAN	STATUS	JABATAN	PENSIUNAN	GAJI PER BULAN	TUNJANGAN	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	PENGHASILAN KENA PAJAK	PAJAK	PENDAPATAN BERSIH	GAJI PER BULAN	PPh
1	WANDIYANTO	K1	Dira Manager	MS	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 0
2	ALVARO REAGEN	K1	Dira Manager	MS	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 56.800	Rp. 941.200	Rp. 941.200	Rp. 56.800
3	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
4	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
6	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
7	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
8	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
9	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
10	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
11	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
12	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
13	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
14	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
15	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
16	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
17	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
18	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
19	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
20	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
21	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0
22	WANDIYANTO	K1	Manajemen	MS	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0

**Gambar 2. Tampilan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan**

Pada gambar diatas, merupakan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan. Pada data ini memuat gaji perbulan dan pertahun, tunjangan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Setelah mendapatkan PKP maka selanjutnya akan dihitung jumlah PPh Pasal 21 yang dikenakan atas gaji karyawan.

Pada data diatas, menunjukkan bahwa terdapat karyawan yang jumlah PKP bernilai minus. Hal itu artinya adalah jumlah PTKP karyawan melebihi jumlah pendapatan atau gaji karyawan per tahun. Oleh karena itu, karyawan tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 21. Sedangkan PKP yang bernilai positif berarti bahwa karyawan tersebut memiliki jumlah PTKP yang melebihi pendapatan gaji per tahun yang akan menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 21.

KODE KARYAWAN	NAMA KARYAWAN	STATUS	JABATAN	GAJI PER BULAN	PTKP	PKP	PPh	GAJI BERSIH PER BULAN	GAJI BERSIH PER TAHUN	GAJI PER BULAN
1	WANDIYANTO	K1	Dira Manager	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 0	Rp. 2.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 2.000.000
2	ALVARO REAGEN	K1	Dira Manager	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 56.800	Rp. 941.200	Rp. 11.294.400	Rp. 941.200
3	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
4	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
5	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
6	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
7	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
8	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
9	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
10	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
11	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
12	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
13	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
14	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
15	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
16	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
17	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
18	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
19	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
20	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
21	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000
22	WANDIYANTO	K1	Manajemen	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 0	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 4.000.000

**Gambar 3. Pemotongan dan Tarif PPh Pasal 21**

Pada gambar diatas merupakan lanjutan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan. Pada data ini berisi tentang jumlah PKP, Pemotongan PPh Pasal 21, gaji bersih per tahun dan per bulan, serta pengenaan pajak per bulannya. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, pada tahun 2023 terdapat karyawan yang dikenakan PPh Pasal 21 atas nama Rudy Hartama dan Alvaro Reagen dengan tarif masing-masing yaitu 5%. Maka pemotongan PPh Pasal 21 atas nama karyawan tersebut adalah Rp. 681.600 dan Rp. 402.000 per tahun. Sedangkan untuk karyawan yang lain tidak dikenakan PPh Pasal 21.

**Gambar 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tahun 2022**

Pada tahun 2022, karyawan yang dikenakan atas PPh Pasal 21 adalah Rudi Hartama sebesar Rp. 120.600 per tahun atau setara dengan Rp. 10.050 per bulan. Sedangkan untuk karyawan lainnya tidak dikenakan PPh Pasal 21

NO	KODE ARSIP	NAMA KARYAWAN	PENGAJARAN NETTO BULAN	GAGAS PER TAHUN	PPh	PPh	PPh	SALDIBERSIH PER TAHUN	SALDIBERSIH PER BULAN	PANGKAL PER BULAN
1	PDL03	RUDI HARTAMA	Rp. 4.906.000	Rp. 58.872.000	Rp. 67.500.000	Rp. 8.628.000	Rp.	Rp. 58.872.000	Rp.4.806.000	Rp.
2	PDL04	ALVARO REAGON	Rp. 4.887.500	Rp. 58.852.000	Rp. 67.500.000	Rp. 8.650.000	Rp.	Rp. 58.852.000	Rp.4.887.500	Rp.
3	PDL07	WILLY ZEIN	Rp. 5.340.000	Rp. 64.080.000	Rp. 72.000.000	Rp. 94.320.000	Rp.	Rp. 57.680.000	Rp.3.140.000	Rp.
4	PDL08	PITRIYANI	Rp. 5.340.000	Rp. 64.080.000	Rp. 72.000.000	Rp. 94.320.000	Rp.	Rp. 57.680.000	Rp.3.140.000	Rp.
5	PDL09	RAHMAT DHI PUTRI	Rp. 2.214.000	Rp. 26.568.000	Rp. 30.000.000	Rp. 31.832.000	Rp.	Rp. 26.568.000	Rp.2.214.000	Rp.
6	PDL10	ANJANI SYAHPUTRI	Rp. 2.214.000	Rp. 26.568.000	Rp. 30.000.000	Rp. 31.832.000	Rp.	Rp. 26.568.000	Rp.2.214.000	Rp.
7	PDL11	GHADI BERRY	Rp. 2.214.000	Rp. 26.568.000	Rp. 30.000.000	Rp. 31.832.000	Rp.	Rp. 26.568.000	Rp.2.214.000	Rp.
8	PDL12	ADITYA PUTRA	Rp. 2.214.000	Rp. 26.568.000	Rp. 30.000.000	Rp. 31.832.000	Rp.	Rp. 26.568.000	Rp.2.214.000	Rp.
9	PDL13	HENRI ALIF	Rp. 2.214.000	Rp. 26.568.000	Rp. 30.000.000	Rp. 31.832.000	Rp.	Rp. 26.568.000	Rp.2.214.000	Rp.
10	PDL14	IFTI HANIGAH	Rp. 2.214.000	Rp. 26.568.000	Rp. 30.000.000	Rp. 31.832.000	Rp.	Rp. 26.568.000	Rp.2.214.000	Rp.
11	PDL15	LUTHFI KASLIAN	Rp. 2.214.000	Rp. 26.568.000	Rp. 30.000.000	Rp. 31.832.000	Rp.	Rp. 26.568.000	Rp.2.214.000	Rp.

**Gambar 5. Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2019-2021**

Berdasarkan pada data diatas menunjukkan bahwa selama 3 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tidak terdapat pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21, hal ini disebabkan oleh terjadinya wabah virus Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya karyawan yang bekerja dari rumah dan diliburkan. Hal itu berdampak pada pengurangan gaji karyawan akibat lumpuhnya perekonomian dan distribusi dari segala bidang usaha.

Selanjutnya hasil wawancara penulis terkait PPh pasal 21 TER dengan Pak Demmy selaku manajer lapangan. PT Putra Dumas Lestari memiliki 53 karyawan. Rata-rata gaji karyawan adalah Rp 5 juta per bulan. Perusahaan memiliki kombinasi karyawan tetap dan karyawan kontrak. Semua karyawan telah memiliki NPWP. Perusahaan telah mendaftarkan karyawannya dalam program JHT, JKK, dan JKM.

1. Penggajian dan Pemotongan PPh 21

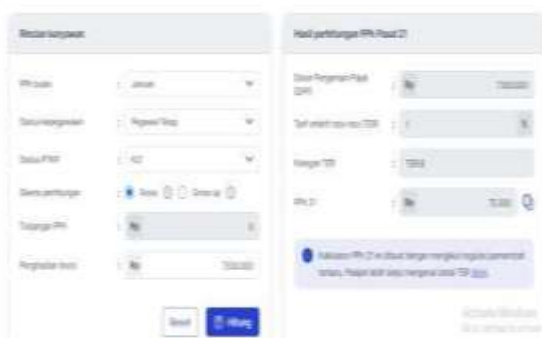
- a) Sistem Penggajian: Perusahaan telah menerapkan SIA untuk mengelola penggajian dan perhitungan PPh 21.
- b) Pemotongan Gaji: Perusahaan menerapkan kebijakan pemotongan gaji untuk beberapa alasan, seperti utang karyawan, kelebihan bayar gaji, ganti rugi perusahaan, dan unpaid leave.
- c) Pemotongan PPh 21: Perusahaan telah memotong PPh 21 setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Metode Perhitungan PPh 21: SIA menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan pajak bulanan dari Januari hingga November dan tarif progresif pasal 17 UU PPh untuk pemotongan pajak pada masa pajak terakhir atau desember.

2. Implementasi Sistem TER

- a) Perubahan Sistem: Pada awal tahun 2024, perusahaan telah menerapkan sistem

TER untuk perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan terbaru.

- b) Penerapan Sistem TER: Perusahaan telah merealisasikan tarif TER sejak bulan Januari 2024.
3. Persepsi tentang Sistem TER yaitu Efisiensi: Sistem TER dianggap lebih efektif karena mengharmonisasikan pemotongan PPh 21 dengan penghasilan karyawan yang diterima dari berbagai sumber, termasuk penghasilan dari perusahaan asing. PT Putra Dumas Lestari telah menunjukkan komitmennya dalam menerapkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi untuk mengelola penggajian dan perhitungan PPh Pasal 21. Perusahaan telah beradaptasi dengan perubahan peraturan perpajakan, khususnya dengan penerapan sistem TER. SIA telah membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan.



**Gambar 6. Tampilan Website Perhitungan PPh Pasal 21 Ter**

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat perhitungan terbaru yang dapat diakses secara online. Dengan perhitungan terbaru ini lebih memudahkan staff accounting untuk mengetahui pengenaan pajak karyawan secara langsung setiap bulannya tanpa menghitung secara manual untuk pertahun. Perhitungan dan Pengenaan PPh Pasal 21 TER dinilai lebih efektif daripada sistem yang terdahulu. Hanya saja tidak memuat nama karyawan, maka staff accounting akan memuat data beserta nama karyawan.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

- 1) Perhitungan gaji karyawan PT. Putra Dumas Lestari dilakukan dengan menggunakan software Microsoft excel. Perhitungan ini berdasarkan dari jumlah absensi manual maupun finger print para karyawan PT. Putra Dumas Lestari dan juga sesuai dengan skill yang dimiliki.
- 2) Sedangkan untuk perhitungan dan pengenaan PPh Pasal 21 pada PT. Putra Dumas Lestari dari tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2024 terdapat perbedaan yang signifikan. Dimana pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, pengenaan PPh Pasal 21 masih menggunakan perhitungan manual untuk pertahun, yang kemudian akan dibagi untuk perbulan sebagai pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. Hal ini menjadi tidak akurat dikarenakan PPh Pasal 21 yang di potong berdasarkan dari gaji tertinggi di setiap bulannya, yang mengakibatkan jika gaji karyawan tidak sama di setiap bulannya akan merugikan karyawan.
- 3) Adanya perhitungan PPh Pasal 21 TER diharapkan dapat lebih mudah dalam pengenaan PPh Pasal 21. Hal itu dikarenakan pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 TER berdasarkan gaji setiap karyawan per bulan. Dengan kata lain pajak yang dikenakan disesuaikan dengan gaji yang dikeluarkan per bulannya.

## **Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah agar PT. Putra Dumas Lestari dapat mengintegrasikan sistem informasi akuntansi dalam penggajian dan pengenaan pajak penghasilan sesuai dengan pasal 21 (PPH 21) yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aalin, E. R. (2018). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. In *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* (Vol. 3, Issue 2, pp. 82–92). Politeknik Negeri Madiun. <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i2.264>
- Astari, D., & Marlina, T. (2022). Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal. In *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan* (Vol. 2, Issue 3). Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i3.1526>
- Aura, I., & Kamilah, K. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Dinas Kesehatan Kota Medan. In *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* (Vol. 5, Issue 1, pp. 1452–1458). Lembaga Sistem Informasi Komputer dan Teknologi (SISFOKOMTEK). <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2991>
- bahardiansyah, alfian, yulianto, riki, & puspitasari, septika. (2022). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus pada CV. BAHARDIAN GALON)*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ucaq5>
- Bandjer, M., Bolotio, R., & Sahari, S. (2021). Peran TVRI Sulawesi Utara Dalam Mengembangkan Wawasan Keagamaan Mualaf di Kota Manado. In *Journal of Islamic Education : The Teacher of Civilization* (Vol. 2, Issue 2). IAIN Manado. <https://doi.org/10.30984/jpai.v2i2.1763>
- Dwijantara, I. M. M., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Karyawan Pada Pramudi Angkutan Siswa Gratis Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Perusahaan. In *Hita Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 2, Issue 2, pp. 94–116). Universitas Hindu Indonesia. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1526>
- Erlangga, A. S., & Sabine, M. A. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan. In *Jurnal Kendali Akuntansi* (Vol. 1, Issue 1, pp. 65–83). Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i1.192>
- Ferdila, F., & Lailiyah, S. N. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Menunjang Efektifitas Pembayaran Gaji Pada Pt Sindo Utama Jaya. In *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing* (Vol. 17, Issue 1, pp. 1–14). Universitas Bung Hatta. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v17i1.59>
- Friska, F. N. P., & Kamilah, K. k. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Dalam Upaya Mendukung Efektifitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus PT Fajar Agung Desa Bengabing). In *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 3, Issue 1, pp. 1–5). Politeknik Pratama Purwokerto. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i1.648>
- Hanum, L., Panjaitan, B., Samri, Y., & Nasution, J. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Mendukung Pengendalian Intern pada PT.

- Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Selamat. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1206–1224. <https://doi.org/10.47467/ELMAL.V3I6.1201>
- Harun, H. (2022). The Effect Of Individual Morality And Internal Control System Against Fraud At The Publicservice Center In Pinrang Regency. *Journal AK-99*, 2(November 2022), 116–123.
- Intishar, Y., & Muanas, M. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* (Vol. 6, Issue 2, pp. 94–103). Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i2.136>
- Iqbal, J., Utami, N. P., & Adinda, P. N. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. In *J-AKSI : JURNAL AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI* (Vol. 5, Issue 1, pp. 54–63). Universitas Majalengka. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v5i1.7948>
- Khomsiyah, N. M. N. dan K. P. (2022). Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana. *Jramb*, 8(November), 82–95.
- Kriswanta, K., Mulyono, A., Iskandar, H., Haris Pratama, F., Wiji Astuti, D., & Aulia, A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan dan Pengembangan Karir Terhadap Niat untuk Tinggal dengan Keterikatan Kerja sebagai Intervening. *MASTER: Jurnal Manajemen Strategik Kewirausahaan*, 1(1), 37–46. <https://doi.org/10.37366/master.v1i1.135>
- Langi, B., Saerang, D. P. E., & Gerungai, N. Y. T. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Dalam Upaya Pengendalian Internal Pada Pt. Gemilang Emas Indonesia. In *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 14, Issue 1). Universitas Sam Ratulangi. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22324.2019>
- Mulia, F. A., Veithzal, A. P., & Mutaqin, J. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di PT XYZ. In *STAR* (Vol. 13, Issue 1, p. 47). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung. <https://doi.org/10.55916/jsar.v13i1.78>
- Murniwati, M., & Ismail, N. M. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Terhadap Pengendalian Intern Pada Klinik Speedlab Indonesia. In *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* (Vol. 5, Issue 1, pp. 38–46). Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol5no1.503>
- Pohan, H. T. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. In *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* (Vol. 4, Issue 2, pp. 113–135). Universitas Trisakti. <https://doi.org/10.25105/jipak.v4i2.4464>
- Putri, R. A., & Syafina, L. (2018). Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Desktop Dengan Metode Stradis. *ALGORITMA: Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 03(01), 21–30.
- RAHMADANI, I. K. A. (2018). Hubungan Antara Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi Dan Kesiapan Instansi Pemerintah Dalam Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. In *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis* (Vol. 2, Issue 1). Universitas Teuku Umar. <https://doi.org/10.35308/akbis.v2i1.488>
- Rambe Prodi Akuntansi Syariah, M., Ekonomi Dan Bisnis Islam, F., & Nurlaila Prodi Akuntansi Syariah, N. (2024). Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian

- Internal pada Gudang Spare Part PT. Socfin Indonesia Perkebunan Aek Pamienke. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 322–331. <https://doi.org/10.61132/RIMBA.V2I2.799>
- Rizqi, I. Z., Harmain, H., & Aslami, N. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penjualan E-Ticket Menggunakan Aplikasi Kai Access (Studi Kasus Pada Pt. Kereta Api Indonesia Medan). *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(4), 279–292. <https://doi.org/10.59581/JKA-WIDYAKARYA.V1I4.1263>
- Samanto, H. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan. In *Jurnal Akuntansi dan Pajak* (Vol. 22, Issue 1). STIE AAS Surakarta. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2471>
- Sanjaya, D., Samri, Y., & Harahap, R. D. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Upaya Mendukung Pengambilan Keputusan Pada Rumah Sakit Umum Haji Medan. In *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* (Vol. 2, Issue 2, pp. 114–127). Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i2.458>
- Saputri, L., & Siregar, Y. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Pt. Cicor Panatec. In *Jurnal Bening* (Vol. 6, Issue 2, p. 317). Universitas Riau Kepulauan. <https://doi.org/10.33373/bening.v6i2.2033>
- Sari, L. F., Sudarman, S., & Kusuma, S. Y. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada CV. Thamrin Square Semarang). In *Jurnal Cakrawala Informasi* (Vol. 1, Issue 1, pp. 20–30). Institut Teknologi Dan Bisnis Semarang. <https://doi.org/10.54066/jci.v1i1.210>
- Setiabudi, A. W. (2019). Analisis Pemenuhan Konsep Current Payment Dan Final Liability Dalam Penghitungan Pph Pasal 25 Dan Pengenaan Sanksi Terkait. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 13, Issue 1, pp. 72–104). Atma Jaya Catholic University of Indonesia. <https://doi.org/10.25170/jara.v13i1.489>
- Setiawan, A., & Aisyiah, H. N. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Di Industri Mebel Abc. In *Inventory: Jurnal Akuntansi* (Vol. 3, Issue 1, p. 47). Universitas PGRI Madiun. <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i1.4195>
- Siregar, S., Nurwani, N., & Harmain, H. (2023). Analysis of Accounting Information Systems of Cash Receipts and Cash Dispenses at PT. JNE Medan Main Branch. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 6(2), 1122–1136. <https://doi.org/10.31538/IIJSE.V6I2.3771>
- Suprihati, S., & Kristiyanti, L. M. S. (2021). Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, Pengetahuan Manajer Akuntansi Dalam Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi PT Indah Yatama Air Cargo Jateng. In *Jurnal Akuntansi dan Pajak* (Vol. 22, Issue 1). STIE AAS Surakarta. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2498>
- Suryanti, E., Lesmana, H., Mubarok, H., & Zulfa, P. F. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Pada Sebuah Perusahaan. In *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)* (Vol. 3, Issue 1, pp. 17–24). Universitas Bina Sarana Informatika. <https://doi.org/10.31294/jasika.v3i01.1921>
- Triasari, D., Maria, R. A., & Lisnawanty, L. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Absensi dan Penggajian Karyawan pada PT. Infratech Indonesia. In *Jurnal Sistem Informasi*

- Akuntansi* (Vol. 3, Issue 2, pp. 24–33). Universitas Bina Sarana Informatika. <https://doi.org/10.31294/justian.v3i2.1457>
- Yanti, H., & Mustoffa, A. F. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Daria Dharma Pratama Air Berau). In *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis* (Vol. 5, Issue 1). Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://doi.org/10.24269/asset.v5i1.4955>
- Yuliani, W., & Siliwangi, I. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Quanta*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Yusuf, N. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Pt Alfa Kreasi (Weekend Inc). In *Jurnal Teknik dan Science* (Vol. 3, Issue 1, pp. 1–12). Asosiasi Dosen Muda Indonesia. <https://doi.org/10.56127/jts.v3i1.1208>
- Zulhendra, & Amalia, B. R. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Pada Wilayah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat. In *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* (Vol. 2, Issue 1, pp. 34–41). LPPM Universitas EKASAKTI. <https://doi.org/10.31933/dttnx77>